

Belanja Modal- Pemerintahan Prabowo Tetap Fokus Pada Proyek Strategis Sulsel



Sumber gambar:

<https://beritakotamakassar.com/berita/2024/09/17/pemerintahan-prabowo-tetap-fokus-pada-proyek-strategis-sulsel/>

Menjelang masa jabatan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin berakhir pada Oktober mendatang, Penjabat Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakhrulloh menyatakan, kalau sejumlah proyek di Sulawesi Selatan yang menjadi program dari Pemerintah Pusat tetap menjadi prioritas di pemerintahan Presiden Prabowo nantinya. Baik yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) dan Proyek Strategis Nasional di Sulawesi Selatan.

Ia mengatakan pergantian kepemimpinan tidak akan memiliki pengaruh dengan program yang sudah jalan. “Tidak akan memiliki pengaruh, karena ini tidak berkaitan, tentunya di masa transisi ini antara Presiden lama (Joko Widodo) ataupun yang melanjutkan pembangunan (Presiden terpilih),” terang Prof Zudan, Senin (16/9).

Lebih lanjut, Prof Zudan menyatakan di masa transisi ini semua sudah dibicarakan. “Semuanya berjalan sesuai dengan proses dan berkelanjutan,” sebutnya. Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin, Provinsi Sulsel menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian dari segi pembangunan infrastruktur, pengembangan moda transportasi baru di lima kota besar, kemudian di sektor pertanian dengan kehadiran bendungan dan jaringan irigasi.

PROYEK STRATEGIS DI SULSEL:

- *Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar- Parepare*
- *Sistem angkutan umum massal perkotaan di enam wilayah, dimana salah satunya [Kota Makassar](#).*
- *Makassar New Port*
- *Bendungan Pasellorang di Kabupaten Wajo*

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- *Bendungan Karraloe di Perbatasan Gowa dan Jeneponto*
- *Bendungan Pammukulu di Kabupaten Takalar*
- *Kereta Api Trans Sulawesi tahap I Makassar-Parepare Jalur Barru-Maros.*
- *Bendungan Baliase di Kabupaten Luwu Utara*
- *Kawasan Industri Takalar*
- *Kawasan Industri Bantaeng*
- *Jaringan Irigasi Bendung Baliase.*

Dari data yang diperoleh, dalam RPJMN 2020-2024, Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020, yang masuk dalam Proyek Prioritas Strategis (Major Project) diantaranya 9 Kawasan Industri luar pulau Jawa, pengembangan Wilayah Metropolitan, dimana Makassar menjadi salah satu kota yang termasuk selain Palembang, Banjarmasin dan Denpasar. Ada juga pembangunan Jalur Kereta Api Makassar- Parepare, Sistem angkutan umum massal perkotaan di 6 Wilayah, dimana salah satunya Kota Makassar. Kemudian ada revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi Udang dan Bandeng.

Ada juga sejumlah PSN di Sulsel sejauh ini sudah ada yang diresmikan dan dimanfaatkan, diantaranya Makassar New Port, Bendungan Pasellorang di Kabupaten Wajo, Bendungan Karraloe di Perbatasan Gowa dan Jeneponto, Bendungan Pammukulu di Kabupaten Takalar, Kereta Api Trans Sulawesi tahap I Makassar-Parepare Jalur Barru-Maros. Kemudian Bendungan Baliase di Kabupaten Luwu Utara, kemudian Kawasan Industri Takalar, Kawasan Industri Bantaeng, Jaringan Irigasi Bendung Baliase. Sebagian dari proyek tersebut sudah diresmikan langsung pemanfaatannya oleh Presiden Joko Widodo.(jun)

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

[Proyek](#) pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada [APBD](#) 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. <https://beritakotamakassar.com/berita/2024/09/17/pemerintahan-prabowo-tetap-fokus-pada-proyek-strategis-sulsel/>
2. <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.